# BAB II

# KERJASAMA PEMERINTAH JAWA BARAT – PEMERINTAH PROVINSI CHIANG RAI DI BIDANG PARIWISATA

1. **KERJASAMA SISTER PROVINSI JAWA BARAT – CHIANG RAI DI BIDANG PARIWISATA**
2. **PENGERTIAN SISTER PROVINSI**

O’Toole (2001) mendefinisakan *sister city/province* sebagai bentuk kerja sama yang disepakati secara resmi antara dua negara definisikan sister province sebagai bentuk kerja sama yang disepakati secara resmi antara dua masyarakat di dua Negara yang berbasis luas. Definisi yang lebih khusus digunakan oleh Villers (2005), sister city/province yaitu kerjasama strategis jangka panjang antara masyarakat di berbagai kota atau kota-kota dimana kota mereka menjadi pemeran utama. Secara resmi artinya hubungan sister city harus disetujui otoritas lokal yang mendukung kegiatan masyarakat (SCI, 2003).

Definisi berkembang, peningkatan kapasitas pemerintah lokal telah menjadi elemen umum melalui dorongan desentralisasi dan intervensi yang ditunjukan pada reformasi sektor publik (Tjandradewi and Marcotullio 2009). Banyak intervensi pengembangan kapasitas tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemerintahan yang baik. Kemitraan sister city ini memfasilitasi transfer pengetahuan dan keahlian antar kota untuk mengatasi kebutuhan, termasuk kinerja pemerintah kota, pelayanan, dan penguatan masyarakat sipil. Di konsep sister city, kota merujuk tidak hanya kepada pemerintah daerah/kota, tapi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat sipil, komunitas bisnis, ataupun komunitas pendidikan. Pemerintah daerah tidak hanya memainkan peran sebagai fasilitator yang penting dalam menetapkan dan memelihara hubungan, tapi juga sebagai ikatan primer yang dijalin antara masyarakat, tidak hanya antara pemerintah daerah (Villiers 2011).

Villiers (2009) mengusulkan enam langkah siklis model atau kerangka konseptual kemitraan sister city dalam membentuk, mengelola, mempertahankan dan membangun kesuksesan kemitraan dan kemampuan beraliansi, yaitu (1) Strategi; kerangka manajemen dimulai dengan perumusan strategi aliansi. Sebelum mitra terlibat, sebuah organisasi memerlukan strategi aliansi untuk menguraikan pemikiran terkait visi dan tujuan untuk kemitraan, strategi untuk pemilihan mitra, untuk memanajemen, dan cara menangkap pembelajaran (Villers, 2009). Kern (2001:12) menunjukan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat lokal perlu strategi, dimana dua strategi yang ditempuh adalah learning dan networking internasional. Dari strategi aliansi akan menjadi jelas jenis mitra yang harus dicari. (2) Identifikasi; dalam mencari mitra strategis, kota atau komunitas biasanya mendekati lembaga perjodohan internasional dan mungkin juga didekati oleh kota-kota atau masyarakat lain dengan kemiripan permintaan. Permintaan tersebut hanya dapat dipertimbangkan jika kota tersebut ada dalam parameter strategi kerja sama.[[1]](#footnote-1)

1. **Latar Belakang Kerjasama Jawa Barat – Chiang Rai**

Adanya kebutuhan untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri dalam rangka penciptaan jejaring dan pemenuhan kebutuhan serta sebagai salah satu cara dalam mengakselerasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, maka dianggap perlu untuk dilakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Hanya saja dalam pemilihan mitra kerjasama harus dilakukan secara hati – hati dikarenakan kerjasama luar negeri bukan hal yang diturunkan untuk menjadi suatu kewenangan daerah akan tetapi daerah diberi celah untuk bisa memanfaatkan kerjasama luar negeri sebagai bentuk total diplomacy.

Kerjasama RI – Thailand yang dimungkinkan menjadi payung bagi rencana kerjasama Jawa Barat – Chiang Rai:

1. Bidang Ekonomi dan Perdagangan
2. Bidang pertanian
3. Bidang penerangan, sosial budaya dan pendidikan.
4. Bidang Pariwisata.
5. Kerjasama di bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Seiring dengan prinsip tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik, sinergitas dan saling menguntungkan.[[2]](#footnote-2)

Pada kenyataannya daerah memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menghambat upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Daerah dituntut untuk lebih proaktif dalam mencari sumber serta memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang kompeten.

UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada pasal 1 (1) : Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara.

Salah satu bentuk kerjasama dan kemitraan adalah kerjasama *sister province,* dimana daerah, dengan mempertimbangkan potensinya dapat mengajukan, mengusulkan dan melakukan kerjasama dengan provinsi di negara lain, untuk kepentingan pembangunan dan penciptaan kesejahteraan rakyat. Pemilihan mitra kerjasama dari luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan, diantaranya kesamaan kultur, demografi dan geografi; serta adanya kepentingan lain seperti perdagangan dan alih teknologi, yang dirasa belum cukup terakomodasi jika kerjasama dilakukan dengan pihak-pihak lain dalam tataran domestik. Hal ini sesuai dengan UU nomor 24 tentang Perjanjian Internasional juga dengan Permendagri no. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri dan Permenlu No. 09/A/KP/XII/2006/01 tahun 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

 Rencana kunjungan ini juga sebagai salah satu bentuk dukungan untuk terciptanya ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 yang membutuhkan dukungan semua pihak agar program ini terwujud termasuk dukungan dari Pemerintah Daerah. Penjajakan kerjasama ini adalah salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah dalam mewujudkan AEC 2015. Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :

1. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
2. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM);
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration (IAI); dan
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Selain hal – hal tersebut di atas, yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah:

1. Telah dilakukan penjajakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Chiang Rai pada tahun 2007 – 2008 dalam bidang yang terkait dengan pengembangan sosial ekonomi masyarakat, yaitu kerjasama bidang pendidikan tinggi, kebudayaan, industri kecil dan menengah, perdagangan serta pengembangan pariwisata. Rencana kerjasama telah dituangkan dalam bentuk LoI (pernyataan kehendak) *Sister Province* namun karena kerusuhan di Bangkok, kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan.
2. Sesuai dengan misi KBRI yang akan mengoptimalkan setiap peluang kerjasama antar masyarakat kedua negara termasuk realisasi kerjasama “*people to people contact*” di bidang pendidikan, pariwisata, perdagangan dan bidang lainnya dengan lebih memanfaatkan potensi yang dimiliki Indonesia untuk meningkatkan citra positif Indonesia dengan merencanakan kegiatan ke depan adalah mendorong pelaksanaan kerjasama antar Provinsi yang telah menjalin penjajakan dengan cara mengefektifkan kerjasama *Sister Province* yang telah ada dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi (TTI), pertanian dan budaya serta pendidikan di kedua Negara yang bersifat komplementari.
3. Pada tanggal 9 – 10 Agustus 2010 dilakukan Rapat Inter Kementerian dalam rangka persiapan *The 7th Joint Commission Meeting* RI – Thailand dimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat diundang untuk menjadi peserta pada Kelompok Kerja bidang Sosial Budaya dalam rapat tersebut terungkap keinginan Kementerian Luar Negeri untuk menginisiasi kembali rencana *Sister Province* antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Chiang Rai, Thailand.
4. Pada tanggal 18 Oktober 2011 di Bandung, KBRI Thailand dengan dipimpin oleh Duta Besarnya, Bapak Mohammad Hatta melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Bapak Gubernur menyambut baik tawaran Duta Besar RI untuk Thailand untuk kembali membangun kerjasama dengan Provinsi Chiang Rai. Kedua wilayah dinilai memiliki kecocokan potensi utamanya dalam bidang pertanian, pengembangan pariwisata, pendidikan dan pengembangan UKM. Tiga hal yang menjadi keunggulan provinsi ini adalah bidang perkebunan (memiliki ribuan hektar kebun kopi yang sudah diekspor di berbagai Negara), Chiang Rai berada di kawasan *Golden Triangle* berbatasan langsung dengan negara: Kamboja, Laos dan Myanmar serta memiliki perdagangan perbatasan dengan 3 (tiga) negara tetangga yaitu China Selatan, Myanmar dan Laos dikenal juga dengan *Chiang Rai Border Trade,* hal ini bisa menjadi satu keuntungan karena dengan menjalin kerjasama dengan Chiang Rai maka produk – produk baik barang dan jasa Jawa Barat bisa masuk ke 3 (tiga) negara tersebut karena selama ini Provinsi Chiang Rai menjadi hub bagi negara – negara tersebut. Memang harus dipelajari lebih lanjut apa yang menjadi keunggulan dari produk – produk Jawa Barat yang dibutuhkan yang tidak bisa dipenuhi oleh negara lainnya karena hampir bisa dipastikan barang – barang primer dan sekunder dipenuhi oleh produk – produk dari Negara China.
5. Selain itu Provinsi Chiang Rai juga kaya akan tanaman obat sehingga menjadi pusat pengobatan tradisional herbal di Thailand. Dalam bidang pertanian Jawa Barat bisa bertukar pengetahuan (*sharing knowledge*) dalam hal mengelola hasil panen dan meningkatkan produksi tanaman pangannya. Selain itu, hal yang bisa dipelajari dari Chiang Rai adalah cara memperluas pasar hal ini tidak lepas dari lokasi Provinsi ini yang menjadi hub bagi RRC dan negara – negara di Asia Tenggara.
6. Diharapkan kerjasama *Sister Province* dapat menjadi landasan untuk kerjasama teknis lebih lanjut dalam berbagai bidang. Juga kerjasama *Sister University* diharapkan juga bisa menjadi salah satu agenda, dikarenakan Jawa Barat di kalangan masyarakat Thailand terkenal sebagai salah satu daerah yang memiliki institusi pendidikan yang baik.
7. Surat dari Kedutaan Besar RI di Bangkok nomor 342/X/2011/EKON yang mendukung pembentukan *Sister Province* dan mengundang Provinsi Jawa Barat untuk hadir pada festival Ratchapruek 2011 di Chiang Mai yang berlangsung sampai bulan Maret 2012. Untuk bisa menghadiri festival tersebut maka KBRI Thailand menyarankan untuk dilakukan kunjungan pada bulan Februari atau awal Maret dimana festival tersebut masih berlangsung.
8. Dalam pengembangan industri yang mengarah pada pengembangkan ekspor maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki rencana untuk membawa industri yang ada di Jawa Barat untuk dikembangkan pasarnya di Chiang Rai, Thailand. Lebih spesifik lagi ada pada pengembangan industri kreatif. Hal ini didasarkan kepada data demografi Provinsi Chiang Rai dimana kl 80% penduduknya adalah generasi muda. Pada nantinya diharapkan bahwa generasi muda Chiang Rai mengenal Jawa Barat dan produk – produknya.[[3]](#footnote-3)
9. **TUJUAN KERJASAMA SISTER PROVINSI**

Maksud kerjasama ini :

1. untuk mempererat hubungan bagi kedua daerah yang sudah terbentuk sebelumnya adalah juga untuk memaparkan kembali potensi dan juga berkomunikasi untuk mengembangkan potensi kerjasama yang ada. Dalam hal ini rencana kerjasama yang akan dieksplor ada pada bidang :
2. pertanian, Chiang Rai terkenal dengan produk dan hasil olahan pangannya termasuk di dalamnya adalah pengemasan dan pemasaran produk – produknya.
3. Industri kreatif, Jawa Barat khususnya Bandung terkenal dengan industri kreatifnya diantaranya adalah : animasi dan distro. Hal ini jika dikembangkan kerjasama maka Chiang Rai dan umumnya Thailand bisa menjadi pasar yang potensial bagi Jawa Barat.
4. Dukungan kepada para pelaku industri khususnya yang bergelut di bidang jasa industri kreatif dengan cara memperkenalkan pasar baru.

Sedangkan tujuannya adalah terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak juga terbukanya jejaring bagi para pelaku usaha di kedua daerah. Sehingga ASEAN *Connection* dan *people to people contact* di antara negara – negara ASEAN terwujud. Sehingga pada akhirnya tercipta kemakmuran bagi masyarakat kedua daerah.[[4]](#footnote-4)

## GAMBARAN KERJASAMA INDONESIA – THAILAND

1. **GAMBARAN KERJASAMA INDONESIA-THAILAND:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **KERJASAMA INVESTASI DAN PERDAGANGAN** |
|  | PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN | HAMBATAN | KEGIATAN KEDEPAN DAN SARAN TINDAK LANJUT |
|  | * Pejabat kedua negara telah melakukan saling kunjung seperti Wakil Menlu Thailand dan Deputi PM Thailand serta pejabat dari *Board of Investment* (BOI) dan *Exim Bank of Thailand.*
* *Roadshow* investasi dan perdagangan telah dilaksanakan di Provinsi Bangkok, Khon Kaen, Chiang Mai, **Chiang Rai,** Phuket, Hadyai, Trang, Udon Thani, Chantaburi.
* *Draft Trade Agreement* Indonesia – Thailand telah disepakati oleh kedua negara, saat ini menunggu persetujuan dari Parlemen Thailand.
* Mendukung partisipasi Indonesia dalam mengikuti pameran *Bangkok International Fashion Festival* dan *Bangkok International Leather Festival* (BIFF & BIL) sebayak 2 kali.
* Mengundang partisipasi pengusaha Indonesia dalam pameran *Tea & Coffee Exhibition*.
 | * Ketiadaan database yang akurat mengenai perusahaan, jumlah dan nilai investasi di kedua negara.
* Kurangnya informasi yang *up – to date* mengenai peluang investasi dan fasilitas yang diberikan.
* Perlu kejelasan alur dan prosedur perijinan investasi di Indonesia.
* Ketiadaan database calon mitra yang potensial dan terpercaya.
* Keterbatasan infrastruktur yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia.
 | * Beberapa peluang kerjasama di bidang ekonomi yang perlu dimanfaatkan secara maksimal, antara lain di bidang *food processing and baverage* kopi, kelapa dan *palm oil*), *parts and component industry*, sektor jasa kesehatan/medis dan spa/kecantikan, *sugar cane* dan *halal food.*
* *Roadshow* TTI akan terus dilakukan dalam rangka promosi Indonesia di Thailand dan mendorong Investasi Thailand ke Indonesia.
* Mendorong partisipasi pengusaha Indonesia dalam kegiatan pameran yang dilaksanakan di Thailand.
* Meningkatkan *information sharing* tentang perusahaan yang akan atau sudah melakukan kerjasama di kedua Negara.
* Mengeksplorasi kerjasama untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia dan infrastruktur yang dapat mendekatkan *connectivity* antara Indonesia dengan ASEAN *mainland countries* seperti Thailand, misal: pembukaan jalur baru transportasi laut dan udara yang menghubungkan kedua Negara.
 |
| 2. | **KERJASAMA PERTANIAN** |
|  | * Sebagai tindak lanjut pelaksanaan butir kerjasama yang terdapat pada hasil pertemuan ”*The 3rd JAWG Meeting Indonesia – Thailand”,* pada tanggal 5 – 6 Agustus 2009 di Bogor, Indonesia telah dilaksanakan *Expert Group Meeting on Sustanaible Agriculture and Food Security* yang dihadiri oleh Menteri Pertanian kedua negara. Thailand akan menjadi *host* pada pertemuan berikutnya yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun 2010 atau awal tahun 2011.
* Pada tanggal 28 – 30 Juni 2010 di Makassar, Sulsel, telah dilaksanakan pertemuan ke – 4 *Joint Agricultural Working Group* (JAWG). Penyelenggaraan JAWG ke – 4 bertujuan untuk meninjau 15 program kerjasama yang telah disepakati pada 3 pertemuan sebelumnya serta membahas *project proposal* baru yang meliputi 13 kegiatan.
* Pada kesempatan tersebut juga telah dilakukan *business meeting* antara pengusaha Thailand dan pengusaha daerah di Sulsel khususnya untuk komoditi teh, kakao dan kopi.
 | Beberapa usulan proyek yang akan dilaksanakan tidak terealisasi karena kurangnya koordinasi dan manajemen komunikasi antar *contact person* dari Kementerian Pertanian Kedua Negara. | * The 5 th Joint Agricultural Working Group akan dilaksanakan di Thailand pada tahun 2011.
* Agar berbagai usulan proyek kerjasama yang diajukan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.
* Perlu mencari peluang kerjasama yang lebih bersifat strategis dan saling melengkapi *(complimentary)* dalam proses pengembangan pertanian kedua negara dan tidak hanya berupa *sudy visit*.
 |
| 3. | **KERJASAMA SISTER PROVINCE** |
|  | * Sejak ditandatanganinya MoU kerjasama *Sister Province* oleh Gubernur Yogyakarta dan Gubernur Chiang – Mai pada 4 September 2007. Gubernur Chiang – Mai telah berkunjung ke Jogjakarta pada Juli 2010
 | * Adanya penggantian pejabat Provinsi Chiang – Mai paska penandatanganan MoU menjadi kendala komunikasi kedua belah pihak dalam menindaklanjuti MoU.
* Masih minimya interaksi antar para pengusaha di kedua Provinsi.
* Keterbatasan supply informasi mengenai potensi kerjasama yang dapat ditingkatkan diantara kedua Provinsi.
 | * Mendorong pelaksanaan kerjasama antar Provinsi yang telah menjalin *Sister Province*.
* Penjajakan kerjasama *Sister Province* antara Sulawesi Selatan dengan Provinsi di Thailand sesuai rekomendasi pada pertemuan ke – 4 JAWG di Makassar bulan Juni 2010.
* Mengefektifkan kerjasama *Sister Province* yang telah ada dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi
 |
| 4. | **KERJASAMA KEBUDAYAAN** |
|  | * Kerjasama kebudayaan Indonesia – Thailand didasarkan pada MoU Kebudayaan yang ditandatangani oleh Menlu Hassan Wirajuda dan Menlu Suraklat Sathirathai pada tanggal 17 Januari 2002. Kerjasama tersebut selain kebudayaan melliputi pula kerjasama bidang pendidikan, media dan olahraga. MoU tersebut berlaku selama 5 tahun dan berakhir pada bulan Januari 2007, namun dinyatakan bahwa MoU akan tetap berlanjut apabila terdapat satu pihak yang ingin melakukannya.
* Pada tahun 2006 atas inisiatif Indonesia diluncurkan *Trail of Civilization* dan menghasilkan *Borobudur Plan of Action*. Pada pertemuan *Joint Commission* tahun 2007 kedua negara sepakat untuk mengimplementasikan isi dari *Borobudur Plan of Action*. Selain itu telah beberapa kali diadakan pertemuan beberapakali untuk membahas masalah ini.
* Pertemuan *Trail of Civilization* pada tahun 2009 yang dilaksanakan di Jogjakarta belum berhasil
 | * Pelaku industri pariwisata di kedua negara (*hotel and convention association, travel bureau association, travel writer/editor, airlines, guide association*, dll) belum aktif ikut mendorong implementasi dari *Borobudur Action of Plan.*
 | * *Joint Commission* perlu mendorong pelaku industri pariwisata kedua negara untuk aktif mengimplementasikan *Borobudur Action of Plan.*
 |
| 5. | **KERJASAMA PARIWISATA** |
|  | * Kerjasama pariwisata pada umumnya didasarkan pada Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Budaya Pariwisata Gde Ardika dengan Menlu Thailand Dr. Surakiart Sathirathai pada tanggal 23 Mei 2003. Pada pertemuan kedua kepala negara pada tahun 2005 telah ditekankan perlunya pengembangan kerjasama pariwisata ke depan.
 | * Belum terdapat perkembangan yang signifikan dalam pengembangan kerjasama kepariwisataan.
* Kurangnya promosi terhadap pariwisata Indonesia secara umum sehingga kurang dikenal oleh wisatawan Thailand.
 | * Kedua pemerintah perlu untuk secara sungguh – sungguh membahas kerjasama konkrit di bidang pariwisata. Berdasarkan kepada peningkatan keuntungan bersama dan saling komplementari dalam pengembangan pariwisata kedua negara.
* Kerjasama itu perlu pula mencakup bentuk – bentuk wisata kreatif seperti *ecotourism, medicaltourism*.
* Upaya meningkatkan kerjasama perlu mencakup pengaturan lebih baik dan saling mengisi jalur dan intensitas pelayanan penerbangan kedua negara.
* Pemerintah RI perlu memanfaatkan dengan baik eksistensi Thailand yang saat ini menjadi salah satu pusat jalur utama lalu lintas internasional di kawasan.
 |
| 6. | **KERJASAMA PENDIDIKAN** |
|  | * Intensitas kerjasama di bidang pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kerjasama bilateral maupun dalam rangka kerjasama lingkun ASEAN. Kerjasama tersebut diantaranya meliputi program – program pengenalan dan pendidikan bahasa, pertukaran mahasiswa, kerjasama antar akademisi dan universitas/perguruan tinggi , pengembangan riset dan teknologi, pemberian beasiswa dsb.
* Dalam rangka pemahaman mengenai Indonesia maupun Thailand pada masyarakat kedua negara, program pendirian Indonesian Corner di beberapa Universitas di Thailand sudah mulai dilaksanakan. Penyelenggaraan TVET Camp yang secara berkala dan bergantian antara kedua negara, merupakan program yang ditujukan bagi peningkatan *people to people relations.*
 | * Pertukaran tenaga ahli masih belum sesuai dengan kebutuhan potensi dan sesungguhnya yang dimiliki oleh kedua negara.
* Pendanaan untuk program beasiswa Dharmasiswa masih kurang memadai untuk mendukung keberadaan penerima beasiswa.
 | * Program kerjasama di bidang pendidikan sangat penting sebagai salah satu cara *soft power diplomacy* antara Indonesia – Thailand. Pentingnya untuk mengenalkan Indonesia melalui sektor pendidikan secara reguler dan kontinyu dengan lebih meningkatkan kerjasama di berbagai sektor pendiidkan.
* *Indonesia Center* atau *Indonesian Corner* perlu ditingkatkan jumlahnya di berbagai perguruan tinggi di Thailand serta fungsi penyediaan informasi mengenai berbagai hal seperti pendidikan, pariwisata dan bisnis di Indonesia.
* Kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan kerjasama yang tidak terlalu sensitif terutama dalam melakukan pendekatan di wilayah Thailand Selatan.
* Mengaktifkan forum kegiatan alumni Indonesia untuk meningkatkan pemahaman kedua negara.
 |

1. **RENCANA KERJASAMA**

Rencana kerjasama *Sister Province* antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Chiang Rai, dengan fokus pada bidang – bidang :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Bidang kerjasama | Kondisi objektif  | Saran kerjasama yang dilakukan |
| 1.  | Pertanian | Thailand memiliki keunggulan dalam bidang pengelolaan *off farm*, pengemasan serta marketing produk. | Dinas pertanian bersama koperasi petani/kelompok eksportir melakukan kerjasama dalam rangka *transfer knowledge* dalam bentuk pelatihan maupun program magang bagi petani atau pelaku pertanian lainnya |
| 2. | Industri dan perdagangan | Barang-barang yang diimpor berupa kayu jati, produk agrikultur (jagung), batu bara, dan tas ponsel. | Menurut kami Chiang Rai masih memerlukan lagi produk – produk manufaktur, beserta diversifikasinya. Jawa Barat yang memiliki keunggulan dalam industri manufaktur dan produk – produk UKM dimungkinkan untuk melakukan penetrasi pasar ke daerah tersebut. *Chiang Rai Border Trade* menjadikan daerah yang potensial bagi produk – produk Jabar untuk diperkenalkan. Disini fungsi Kadinda akan lebih diperlukan juga keinginan dari Disperindag Jabar yang ingin membawa industri kreatif perlu didukung dan kita pikir industri kreatif memiliki peluang besar untuk berbicara. |
| 3. | Pendidikan | Pada umumnya masyarakat Thailand sudah cukup mengenal Jawa Barat Indonesia dengan kualitas pendidikannya yang baik dan pada saat ini di Universitas Mae Fah Luang sudah terdapat *Indonesia Corner*, sehingga ini bisa menjadi gerbang pembuka bagi Jawa Barat dalam memperkenalkan industri pendidikan. | Pihak Pemprov Jawa Barat bekerjasama dengan pendidikan tinggi memberikan *short course* kepada siswa/I dari Chiang Rai lingkup *course*-nya sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan   |

1. Sappk.itb.ac.id diakses tanggal 11 maret 2015 jam 10.36.WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. Buku Saku Kunjungan Delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ke Provinsi Chiang Rai, Thailand

11 – 14 MARET 2012 [↑](#footnote-ref-2)
3. TERM OF REFERENCE (TOR) Kegiatan Revitalisasi Kerjasama Dengan Salah Satu Provinsi di Asia Dan Penjajakan Kerjasama Di Wilayah Afrika saelatan Tahun 2012 [↑](#footnote-ref-3)
4. Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012, Dibuat dalam rangka revitalisasi kerjasama dengan Provinsi Chiang Rai. [↑](#footnote-ref-4)